GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 15 November 2006**
Subyek	**: Kelautan**	**Hari**	**: Rabu**
		Halaman	**: 17**

Kelautan

Pesisir RI Terkumuh di Dunia

Jakarta, Kompas - Wilayah pesisir di Indonesia banyak dipenuhi aneka jenis sampah dan menjadi sentra pembuangan limbah. Kotoran itu tidak pernah dibersihkan sehingga antusiasme investor untuk menanamkan modalnya di wilayah pesisir sangat minim.

Padahal, ditilik dari kondisinya kawasan pesisir di Indonesia memiliki pantai yang indah, cocok untuk bisnis pariwisata, budidaya dan berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kelautan.

"Terus terang, wilayah pesisir Indonesia sangat jorok, tidak ramah lingkungan, dan terkumuh di dunia. Semua itu terjadi karena wilayah pesisir Indonesia belum memiliki tata ruang yang baik, yang didukung dengan perencanaan yang matang. Tidak mengherankan jika investor tidak memiliki minat untuk berinvestasi di wilayah pesisir tersebut," kata Direktur Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Irwandi Idris di Jakarta, Selasa (14/11).

Saat ini, menurut Irwandi, sebagian besar negara di dunia telah memiliki tata ruang wilayah pesisir. Dengan penataan ruang itu, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir menjadi lebih sehat dan terorganisasi.

Di China, misalnya, saat belum memiliki tata ruang wilayah pesisir wilayah tersebut nyaris tanpa investasi. Pendapatannya pun dari wilayah itu hanya sebesar 4,33 miliar yuan atau setara dengan Rp 5,109 triliun (satu yuan sama dengan Rp 1.180). Setelah ada tata ruang, kemudian muncul investasi pariwisata, budidaya perikanan, restoran, dan properti di wilayah pesisir China. Saat ini pendapatan dari wilayah pesisir mencapai 7,87 miliar yuan.

Pembahasan RUU

Irwandi mengatakan, DKP dan Komisi IV DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam RUU itu, pemanfaatan wilayah pesisir disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. "Lebih dari itu, akan ada kepastian hukum. Ini yang sangat ditunggu investor," ujarnya.

Kendati belum ada UU, namun enam daerah telah menerapkan perda tentang pengelolaan wilayah pesisir. Keenam daerah tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gorontalo. (JAN)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup